

KUTAI KARTANEGARA

KORAN KALTIM RABU, 9 SEPTEMBER 2026 | EDISI 6064 TAHUN XX

Aulia: Harus Berujung Kepastian Hukum

Penataan Aset Bukan Sekadar Sertifikat

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri menegaskan penataan aset pertanahan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kepastian hukum atas tanah dinilai penting untuk mencegah konflik agraria sekaligus memastikan aset masyarakat dan pemerintah memiliki legalitas yang jelas.

Belum lama ini digelar Rakor oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN Kukar mengangkat tema "Langkah Akselerasi Tuntas Reforma Agraria Kutai Kartanegara" (Lentera). Kegiatan dihadiri narasumber dari Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kukar.

Aulia mengatakan, forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antarinstansi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Kukar. Ini bukan sekadar forum koordinasi, sambungnya, tetapi menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan sejak dini sehingga pemerintah dapat menentukan langkah strategis.

"Melalui forum ini, saya menaruh harapan besar agar seluruh perangkat daerah dapat bekerja sama secara sinergis dan berkelanjutan, guna menciptakan tata kelola aset yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Aulia.

Ia menegaskan penataan aset harus diarahkan pada beberapa persoalan mendasar. Di antaranya memberikan kepastian hukum atas hak tanah, menyelesaikan sengketa

dan konflik agraria, serta melakukan inventarisasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Penataan tersebut juga mencakup aset yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan, Hak Pengelolaan (HPL), hingga tanah yang masuk dalam program redistribusi.

Bagi Aulia, kepastian hukum bukan hanya persoalan administrasi pertanahan. Legalitas yang jelas menjadi fondasi agar masyarakat dapat memanfaatkan tanah secara aman dan produktif, sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah dalam melakukan penataan pembangunan.

Berdasarkan pemetaan sosial dan analisis wilayah, sejumlah kecamatan menjadi bagian dari perhatian penataan, di antaranya Tenggarong Seberang, Muara Kaman, Kembang Janggut dan Sebulu.

Langkah yang dilakukan meliputi inventarisasi dan legalisasi aset warga, sertifikasi melalui program redistribusi dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga penataan ruang di kawasan perbatasan dengan perizinan perusahaan, seperti PBPH maupun IUP.

"Tujuannya jelas, untuk memberikan keadilan ruang serta kepastian hukum bagi fasilitas umum, rumah ibadah, lahan pertanian, maupun permukiman warga," tegasnya.

Aulia ingin penataan aset dilakukan secara komprehensif. Setiap subjek Reforma Agraria diharapkan benar-benar memiliki hak atas tanah yang sah dan berkekuatan hukum.

Menurutnya, kepastian tersebut nantinya tidak hanya memberikan rasa aman kepada masyarakat,

tetapi juga dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi kerakyatan. Dengan status tanah yang jelas, masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan lahan yang dimiliki secara produktif dan berkelanjutan.

"Saya ingin setiap kesepakatan yang dihasilkan dapat diimplementasikan ke dalam rencana tindak lanjut yang jelas, dengan pembagian peran dan tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Per-

tanahan A T R / BPN Kukar Heru Maulana menjelaskan beberapa isu strategis yang dibahas meliputi inventarisasi potensi indikator TORA pada lokasi usulan pelepasan kawasan budidaya kehutanan, regulasi penataan aset, serta pilot project usulan aset pemerintah-

tah daerah di atas HPL transmigrasi untuk pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Selain itu, dibahas pula penataan akses reforma agraria serta pembentukan Kampung Reforma Agraria. Heru berharap seluruh agenda yang dirancang melalui GTRA dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kukar.

"Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kukar dan untuk kita semua," ujar Heru. (hei/sd/ts)

Palang
Merah
Indonesia

KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

UPDATE STOK DARAH

PMI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SELASA, 08 SEPTEMBER 2026
PUKUL 08.00 W.T.A

PRODUK

JUMLAH

WB	14	18	33	10	75
PRC	74	151	128	24	377
TC	2	9	12	5	28

TOTAL **90** **179** **173** **39** **480**

CATATAN : STOK DARAH SELWAKU WAKTU DAPAT DIUBAH!

KETERANGAN :

WB = WHOLE BLOOD

PRC = PACKET RED CELL

TC = TROMBOSIT CONCENTRATE

SUMBER : UDD PMI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PMI KUTAIKARTANEGARA PMIKUKAR2227@GMAIL.COM

09115436000